

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BINTAN DI
DESA TOAPAYA SELATAN KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN
BINTAN**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh :

PUTRA SATRIA

NIM : 080565201095

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI
TANJUNGPINANG**

2014

PUTRA SATRIA

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH

A B S T R A K

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Program pemberdayaan masyarakat yang digunakan sangat beragam salah satu dinas yang memiliki program pemberdayaan adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.

Keadaan sosial ekonomi erat kaitannya dengan mata pencaharian masyarakat, karena mata pencaharian adalah hal yang sangat mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup dan merupakan tolak ukur terhadap kemajuan ekonomi suatu daerah, masyarakat yang baik secara individual maupun berkelompok. Dari data yang didapatkan di Desa Toapaya Selatan, sekitar 1.204 masyarakat yang belum atau tidak bekerja. Pemberdayaan masyarakat pada Desa Toapaya Selatan masih perlu untuk dapat diperhatikan, seperti minimnya kerjasama yang dibuat oleh kepala desa dengan instansi pemerintah seperti Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan sebagai salah satu usulan untuk membangun perekonomian masyarakat.

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan Di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam Adapun informan dalam penelitian ini adalah, masyarakat, aparatur Desa, pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan sebanyak 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan sudah dapat memberdayakan masyarakat Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan sudah dapat menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan memberikan motivasi dan arahan kepada masyarakat untuk dapat berkarya membangun ekonomi masyarakat di Desa Toapaya. melindungi kepentingan masyarakat lemah dengan cara tanggap terhadap keadaan masyarakat.

Kata Kunci : Pemberdayaan masyarakat, Desa

PUTRA SATRIA

Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH

A B S T R A C T

Citizen endeavouring is one of the efforts to improve people's life quality through some programs, some of them are the initiative and some self. Improvement of the people itself, the emendation of environment and its neighbourhood, improvement of its economic side. Developing of its fund organization, and other activities that can improve people's ability to gain more productivities. These programs has so many varieties on different types of organization, some of them are Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, in Efforts to decline any types of poverty and enlarging job opportunity on its area.

The social economic situation is playing a big role on the citizen's profession, because their professions is the most basic things in completing their needs which is the comparison of advances of the territory, the quality of people as if in a cluster or in each person, according to some data's in Desa Toapaya Selatan, There are around 1.204 people that still doesn't or hasn't work yet, people endeavoring in Toapaya Selatan still needs to be noticed, because the government institution such as Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan in Desa Toapaya Selatan, they are, in fact still doesn't give enough attention in efforts of making the people's economy better

The purpose of this research basically is to know how the Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan's efforts in endeavoring people. This research was written using the qualitative and descriptive way. There are also, some sources in this research, they are some citizen, village's apparatuses, workers in Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bintan. Five people in each institution. The techniques of this data analyst that are used in this research are descriptive and qualitative data.

After the research are done. Then we can figure out the results of the previous chapter that Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bintan can already endeavoring the people of Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. That can also create the situation which is the possibility of people's endeavourment are actually developing, so it can motivate and direct them to be active in improving their economic life. And then protects the lower caste of society's every need.

Keywords: community empowerment

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BINTAN DI
DESA TOAPAYA SELATAN KECAMATAN TOAPAYA
KABUPATEN BINTAN**

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau mulai dari seluruh strata masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan

pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus tugas kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.

Pembangunan pedesaan bersifat multiaspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Pembangunan pedesaan telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.

Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan. Tujuan pembangunan pedesaan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Tujuan pembangunan pedesaan adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawansan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sederhana.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Tugas dari kepala desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang dimaksud dari urusan pemerintahan yaitu antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa dan pembentukan lembaga kemasyarakatan. Kemudian tugas kepala desa dalam hal pembangunan yaitu antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum. Sedangkan tugas kemasyarakatan kepala desa yaitu meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Program pemberdayaan masyarakat yang digunakan sangat beragam salah satu dinas yang memiliki program pemberdayaan adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah

perdesaan. Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. Dalam program pemberdayaan Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan menyediakan dana untuk masyarakat dalam bentuk bantuan dana. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/ dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan. Namun jika dilihat di Desa Toapaya tidak semua program pemberdayaan berjalan dengan baik. Seperti yang diapaprkkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1

N O	NAMA USAHA/PEMILIK	JENIS USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	YULI (BAKSO IKAN IBU YULI SEMARANG)	PEMBUAT BAKSO IKAN	KP. RAWA BANGUN KM 17 RT 010/003 DESA TOAPAYA SELATAN	USAHA KRLUARGA (INDIVIDU) (PERIZINAN LENGKAP)
2	RUSMININGSIH	MAKANAN (KERUPUK DAN STICK ROYCO)	KP. RAWA BANGUN KM 17 RT 011/003 DESA TOAPAYA SELATAN	USAHA RUMAHAN (INDIVIDU) (PERIZINAN BELOM ADA)
3	IBU IPUT (KUE KERING)	KUE KERING LEBARAN	KP. RAWA BANGUN KM 18 RT 011/003 DESA TOAPAYA SELATAN	USAHA RUMAHAN/INDIVIDU (PERNAH IKUT PELATIHAN TAPI PERIZINAN BELUM ADA)
4	ICHSAN ASHARI (JAMUR TIRAM PUTIH)	BUDIDAYA JAMUR TIRAM	JL. GESEK KM 18 DESA TOAPAYA SELATAN	USAHA INDIVIDU (BELOM MEMILIKI IZIN)
5	WATIMAH (KERIPIK UBI WATIMAH)	KERIPIK UBI	JL. GESEK KM 19 DESA TOAPAYA SELATAN	USAHA INDIVIDU (BELUM ADA IZIN)
6	SYAFRIDA	NASI LEMAK DAN LONTONG SAYUR	KP. RAWA BANGUN KM 17 RT 010/003 DESA TOAPAYA SELATAN	USAHA INDIVIDU
7	SUPAMI GORENGAN	ANEKA GORENGAN	JL. GESEK KM 20 DESA	USAHA INDIVIDU

			TOAPAYYA SELATAN	
8	KLP. WANITA MANDIRI ANEKA SNACK (KETUA PITRIYANI)	PEYEK, KUE BAWANG, KERUPUK, KERIPIK, DLL	KP. SIMPANGA N KM 16 RT 001/001 DESA TOAPAYA SELATAN	USAHA KELOMPOK (SERTIFIKAT PKP DAN SERTIFIKAT HALAL MUI)
9	IBU UMI KERUPUK RENGGINAN	KERUPUK RENGGINAN	KP. SIMPANGA N KM 16 DESA TOAPAYA SELATAN	USAHA INDIVIDU
10	PAK IMAM RM. SUDI MAMPIR	RUMAH MAKAN	KP. SIMPANGA N KM 16 DESA TOAPPAYA SELATAN	USAHA INDIVIDU
11	SUMINI PECEL	PECEL DAN LONTONG SAYUR	TOAPAYA SELATAN	USAHA INDIVIDU

Sumber : Sarjana Penggerak Pembangun Pedesaan, 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di Desa Toapaya ada 11 Usaha yang terdaftar, namun jika ditelaah masih banyak usaha yang tidak memiliki izin usaha. Tidak hanya itu beberapa diantara usaha tersebut saat ini sudah tidak berjalan lagi, agar usaha dan modal dapat berjalan dengan baik dibutuhkan koordinasi dengan instansi yang berperan seperti Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan. Dinas ini tidak hanya mampu membesarkan usaha masyarakat setempat juga berkewajiban memberikan izin usaha, dan peluang pasar bagi masyarakat didesa dalam menjalankan usaha agar lebih berdaya.

Desa Toapaya Selatan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Merupakan pemekaran dari desa induknya, yaitu : Desa Toapaya. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2005, tentang pembentukan Desa Kuala Sempang, Kelurahan Teluk Lobam di Kecamatan Bintan Utara dan Desa Toapaya Utara, dan Desa Toapaya Selatan di Kecamatan Gunung Kijang yang selanjutnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 23 Agustus 2007 di mekarkan menjadi Kecamatan Toapaya. Pemekaran ini terjadi dikarenakan atas dasar peningkatan jumlah penduduk, potensi ekonomi, luas wilayah, sosial budaya, sosial politik, serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat.

Keadaan sosial ekonomi erat kaitannya dengan mata pencaharian masyarakat, karena mata pencaharian adalah hal yang sangat mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup dan merupakan tolak ukur terhadap kemajuan ekonomi suatu daerah, masyarakat yang baik secara individual maupun berkelompok. Mata pencaharian mayoritas penduduk desa ini adalah sebagai petani perkebunan, karyawan swasta serta buruh bangunan. Dari data yang didapatkan di Desa Toapaya Selatan, sekitar 1.204 masyarakat yang belum atau tidak bekerja, kemudian disusul dengan mengurus rumah tangga sebanyak 1.131 orang. Karyawan swasta sebanyak 795 dan Buruh harian lepas sebanyak 265 orang. Dari hasil pendataan tersebut dapat dilihat bahwa tingkat ekonomi masyarakat masih rendah dan perlu ada program pemberdayaan agar masyarakat dapat lebih sejahtera.

Pemberdayaan masyarakat pada Desa Toapaya Selatan masih perlu untuk dapat diperhatikan, seperti minimnya kerjasama yang dibuat oleh kepala desa dengan instansi pemerintah seperti Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan sebagai salah satu usulan untuk membangun perekonomian masyarakat. Masih ada di Desa Toapaya masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah karena belum adanya program pelatihan kerja yang dibuat oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan sebagai salah satu usulan untuk membangun perekonomian masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Bintan agar nantinya dapat menjadi masyarakat yang mandiri dengan dibantu oleh program-program yang sifatnya membangun yang dibuat oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan bersama perangkat desa. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan masih jarang untuk melakukan motivasi kepada masyarakat. Kurang tanggapnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan terhadap keadaan masyarakat hal ini dapat dilihat dari Desa Toapaya masih terdapat masyarakat memiliki tingkat ekonomi yang masih terbilang rendah, hal ini seharusnya mendapatkan perhatian oleh pemerintah khususnya aparat desa yang dapat memberdayakan masyarakatnya untuk dapat meningkatkan perekonomian yang berujung kepada pembangunan desa.

Berdasarkan paparan di atas maka penulis ingin menganalisis kedalam sebuah usulan penelitian yang berjudul: **"Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**

Kabupaten Bintan Di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan”.

B. Landasan Teoritis

Pranarka dan Vidhyandika (1996:56) menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya. pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga.

Pemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan *powerlessness* (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan), tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sendiri (Priyono, 1996:54). Selain itu pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk, berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005:18) ada lima macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Delivery dalam Sutrisno (2005:17) “dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah: mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan”.

Suharto (2006:59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat

kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan.

Kartasmita (1995:19), upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara:

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin

berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.

3. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Teknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihak, karena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dari luar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut biasanya karena tidak pernah mengikut sertakan partisipasi masyarakat (*top down*), sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakat di dayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan kata lain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktif.

Adimihardja dan Harry (2001, 15) konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (dari, oleh, dan untuk masyarakat). dan salah satu cara yang dipakai dalam teknik pemberdayaan ialah: *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Lebih lanjut Harry menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapa

aspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan, seperti: (1) Perumusan konsep, (2) Penyusunan model, (3) Proses perencanaan, (4) Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan.

Wahab dkk. (2002: 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan dalam *empowerment*, yaitu:

1. *The welfare approach*, pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusia dan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat, tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendekatan *centrum of power* yang dilatar belakangi kekuatan potensi lokal masyarakat.
2. *The development approach*, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keberdayaan masyarakat.
3. *The empowerment approach*, pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidak berdayaan.

Tujuan pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah meningkatkan kesejahteraannya sehingga mereka dapat menikmati kualitas hidup sebagaimana yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Strategi pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil dilakukan dengan mewujudkan ke empat elemen pemberdayaan masyarakat: inklusi dan partisipasi, akses pada informasi, kapasitas organisasi lokal, profesionalitas pelaku pemberdaya. Tantangan utama yang dihadapi dalam memberdayakan masyarakat pedesaan terpencil adalah

pengetahuan yang terbatas, wilayah yang sulit dijangkau, dan pemahaman adat yang kuat pada masyarakat adat.

Untuk dapat memasukkan mereka dalam proses perubahan, maka upaya yang pertama kali perlu dilakukan adalah memahami pemikiran dan tindakan mereka serta membuat mereka percaya kepada pelaku pemberdaya. Selanjutnya mereka perlu berpartisipasi dalam proses perubahan yang ditawarkan dengan memberikan kesempatan menentukan pilihan secara rasional. Proses ini dapat memerlukan waktu yang lama, namun hasilnya akan lebih efektif daripada memberikan pilihan yang sudah tertentu. Pengikutan masyarakat dalam proses perubahan dilakukan secara berangsur-angsur dari kelompok kecil menuju masyarakat lebih luas.

Akses pada informasi dibuka dengan memberikan penjelasan mengenai program-program pemerintah yang akan dilakukan, norma-norma bermasyarakat yang perlu diketahui, ilmu pengetahuan dasar, hak-hak yang mereka peroleh, manfaat perubahan yang akan terjadi, masalah-masalah yang mungkin dihadapi. Pelaku pemberdaya perlu mempunyai kemampuan profesional yang tinggi agar dapat melakukan pendampingan secara baik. Pelaku pemberdaya yang potensial adalah organ pemerintah daerah atau organisasi berbasis masyarakat lokal, yang mempunyai perhatian, komitmen, dan kemampuan untuk membangun masyarakat miskin dan terbelakang. Upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil, baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal, menuntut pola kerja yang fleksibel, tidak terhambat oleh sistem administrasi penganggaran yang ketat. Agar

pelaku pemberdaya masyarakat dapat bekerja secara profesional, maka mereka perlu mendapat pelatihan dan pendidikan yang memadai.

C. Hasil Penelitian

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Salah satu program pemerintah untuk masyarakat Desa adalah program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/ prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/ dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan.

Salah satu tugas kepala Desa adalah membina perekonomian masyarakat desa melalui pelaksanaan program pemerintah. Kepala Desa dalam hal ini harus

mampu menjalin kerjasama dengan beberapa instansi terkait. Salah satunya adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan. Hal ini didasari dalam pemberdayaan masyarakat desa salah satu programnya adalah pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir. Agar usaha dan modal dapat berjalan dengan baik dibutuhkan koordinasi dengan instansi yang berperan seperti Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan. Dinas ini tidak hanya mampu membesarkan usaha masyarakat setempat juga berkewajiban memberikan izin usaha, dan peluang pasar bagi masyarakat didesa dalam menjalankan usaha agar lebih berdaya. Namun jika dilihat di Desa Toapaya tidak semua program pemberdayaan berjalan dengan baik. Untuk melihat pemberdayaan di Desa Toapaya maka dipaparkan dalam dimensi sebagai berikut :

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang

Dari hasil wawancara dengan seluruh informan maka dapat diketahui bahwa di Desa Toapaya sudah mampu menggerakkan masyarakat desa untuk berpartisipasi. Walaupun dimulai dari hal yang kecil seperti gotong royong. Kembali juga berdasarkan observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat juga merupakan faktor penting untuk kemajuan desa. Pada tahap pembangunan biasanya peranan pemerintah biasanya besar. Kegiatan pembangunan sebagian besar adalah usaha pemerintah. Bahkan di negara yang menganut sosialisme yang murni, seluruh kegiatan pembangunan adalah tanggungjawab Pemerintah. Namun dalam keadaan negara berperan besarpun,

partisipasi masyarakat di perlukan untuk menjamin berhasilnya pembangunan. Pembangunan daerah disadari merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat, sedangkan pemerintah Pusat dan Propinsi berperan sebagai pendukung dan pembina. Sebagai konsekuensinya, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang penting dari suatu program pembangunan.

2. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata

Program pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan sudah lama ada di Desa Toapaya, pembentukan awal di Desa ini ini diawali dengan pemberian sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan para pengusaha. Dari hasil wawancara dengan informan dan dari hasil observasi yang dilakukan maka ditemukan kebenaran bahwa dari program ini para pengusaha mendapatkan bantuan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan usahanya. Namun apabila pengusaha membutuhkan sarana dan prasarana yang lainnya maka harus kembali mengajukan permohonan atau proposal. Peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan sebenarnya adalah untuk membentuk keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan Program Kesejahteraan sosial untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. program pemberdayaan masyarakat desa khususnya di Desa Toapaya belum memiliki simpanan dana bergulir. Seperti yang dikatakan oleh para informan bahwa dana yang diberikan hanya pada saat

awal saja dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintang biasanya menyiapkan bentuk usaha bukan dalam bentuk uang

3. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah

Dari hasil wawancara dengan seluruh informan dan observasi yang dilakukan dilapangan dapat dianalisa bahwa Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintang sudah mampu untuk menyelesaikan persoalan yang ada dan menjadi pengayom bagi masyarakatnya. Apapun yang selama ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintang dalam mengelola desa dan mengatur warganya sudah tentu diharapkan membawa perubahan yang berarti dalam rangka kemajuan desa itu sendiri. Perkembangan era reformasi saat ini telah memberikan kewenangan yang lebih kepada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintang, Kepala Desa dan perangkat-perangkat yang ada di dalam desa dalam menata pemerintahannya yang sesuai dengan semangat dan harapan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri terutama yang berhubungan dengan pemerintahan desa. Upaya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Koperasi Kabupaten Bintang untuk menjalin kerjasama sekaligus kedekatan para masyarakat Desa berjalan cukup baik. Ini dapat dilihat dari setiap kegiatan yang dilakukan lebih pada kekuatan tim

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintang sudah dapat menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat

berkembang dengan memberikan motivasi dan arahan kepada masyarakat untuk dapat berkarya membangun ekonomi masyarakat di Desa Toapaya.

- b. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan sudah dapat memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa Toapaya dengan memberikan bantuan serta pelatihan kepada masyarakat, kemudian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan berusaha melindungi kepentingan masyarakat lemah dengan cara tanggap terhadap keadaan masyarakat. Apa yang masyarakat butuhkan.
- c. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan melakukan koordinasi dengan masyarakat untuk mengetahui keadaan desa agar program tidak salah sasaran dan dapat berjalan dengan baik. Namun ada beberapa hal yang masih harus menjadi perhatian yaitu : pihak Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan jarang sekali melakukan sosialisasi seperti memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat berkenaan dengan peralatan teknologi terbaru serta tata cara perawatan peralatan yang disediakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan

2. Saran

- a. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan dan pihak pemerintah desa memberikan bantuan secara berkesinambungan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat desa Toapaya Selatan

- b. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan sebaiknya sering melakukan pertemuan serta pelatihan kepada masyarakat tentang bantuan yang telah diberikan agar lebih tepat guna.
- c. Untuk pemerintah desa seharusnya dapat bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan untuk dapat membantu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan memberikan data yang benar tentang keadaan masyarakat agar setiap program yang dijalankan selalu tepat sasaran.
- d. Bagi masyarakat agar lebih mampu menjalankan setiap program dengan baik, seperti memanfaatkan bantuan yang ada dengan benar

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Adimihardja, Kusnaka; Hikmat, Harry; 2001, *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru I)*. PT Rineka Cipta : Jakarta
- Pranarka dan Vidhandika Moeljarto. 1996 “Pemberdayaan (*Empowerment*)”
Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS:Jakarta
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Rasyid, Rias. 2000. *Pokok-Pokok Pemerintahan*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, PT. Eresco.
- Wahab, Solichin Abdul, dkk., 2002. *Masa Depan Otonomi Daerah*. Malang: Percetakan SIC.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang *Desa*

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bintan

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perencanaan
Pembangunan Desa